

## **Ringkasan Program dan Kegiatan Tahun 2018**

### **DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BOYOLALI**

Kabupaten Boyolali merupakan salah satu dari 35 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah, terletak antara 110° 22' - 110° 50' Bujur Timur dan 7° 7' - 7° 36' Lintang Selatan, dengan ketinggian antara 75 – 1500 meter dari permukaan laut dengan luas wilayah 101.510,1955 ha. dengan bentang wilayah barat – timur sepanjang 48 km dan selatan utara sepanjang 54 km.

Secara Administratif, Kabupaten Boyolali terbagi atas 19 Kecamatan dan 261 Desa serta 6 (enam) Kelurahan dengan jumlah penduduk tahun 2017 sebanyak 989.776 jiwa dan kepadatan penduduk rata-rata 975 jiwa/km<sup>2</sup>. Konsekuensi dari kondisi di atas adalah tumbuhnya dunia industri di Kabupaten Boyolali yang terus meningkat. Usaha/ kegiatan yang ada sebagian besar sudah memiliki Dokumen Upaya Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan.

Disatu sisi, industri ini membawa peningkatan dalam bidang ekonomi dan penyerapan tenaga kerja. Namun disisi lain timbul permasalahan-permasalahan baru dibidang lingkungan. Berbagai kegiatan masyarakat yang bertujuan untuk memperoleh manfaat ekonomi sering kurang memperhatikan lingkungan hidup.

Berbagai isu lingkungan yang hangat dibicarakan dewasa ini diantaranya meliputi pencemaran lingkungan, keterbatasan Sumber Daya Alam, menurunnya keragaman hayati dan perubahan iklim. Oleh karena itu, dalam mengatasi permasalahan lingkungan harus ditingkatkan pelaksanaannya, termasuk pengawasan, pengendalian dan penanggulangan pencemaran serta perbaikan kerusakan lingkungan dalam upaya memulihkan dengan mengurangi maupun meniadakan beban baru terhadap lingkungan.

Terpeliharanya keterlanjutan fungsi lingkungan hidup merupakan tanggung jawab bersama sehingga menuntut peran setiap anggota masyarakat yang dapat disalurkan melalui orang perorang, organisasi lingkungan, seperti Lembaga Swadaya Masyarakat untuk memelihara dan meningkatkan daya dukung serta daya tampung lingkungan hidup menjadi tumpuan keberlanjutan pembangunan sebagai upaya mengatasi kemungkinan timbulnya gangguan lingkungan.

Sebagaimana tersebut diatas, maka Pemerintah telah merencanakan prinsip pembangunan berwawasan lingkungan, yaitu upaya sadar dan berencana untuk menggunakan dan mengolah sumber daya alam yang ada secara bijaksana dalam pembangunan yang berkelanjutan guna meningkatkan kesejahteraan dan mutu hidup masyarakat.

Pada Tahun anggaran 2018, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Boyolali memperoleh alokasi anggaran belanja langsung sebesar : Rp. 38.919.717.000,- (tiga puluh delapan milyar Sembilan ratus Sembilan belas juta tujuh ratus sembilantuju belas ribu rupiah) untuk melaksanakan 11 (sebelas) program dengan 44 (empat puluh empat) kegiatan yang dapat diuraikan sebagai berikut :

#### **I. PROGRAM PENGEMBANGAN KINERJA PENGELOLAAN PERSAMPAHAN**

Program ini didukung oleh 5 (lima) kegiatan sebagai berikut :

##### **A. Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan sampah**

Sesuai Dengan Undang – undang 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah salah satu tugas pemerintah dalam rangka menjamin terselenggaranya pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan maka pemerintah wajib memfasilitasi penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan sampah. Ada beberapa sub pekerjaan/ kegiatan , yang sebagian dialokasikan untuk operasional di TPA winong, antara lain : pengadaan peralatan kebersihan, Pengadaan gerobag sampah, pengadaan dan pemasangan tong sampah, pengadaan kendaraan pengangkut sampah, pengadaan mesin pencacah dan pengayak sampah, penyempurnaan rumah kompos TPA, penyempurnaan IPAL komunal dan IPAL Lindi TPA, pembuatan blok pembuangan sampah baru diTPA, pemasangan dan penyempurnaan instalasi penangkapan dan pemanfaatan gas methan TPA, penyempurnaan bangunan pembuangan sampah (TPST Karanggede)

##### **B. PENINGKATAN OPERASI DAN PEMELIHARAAN PRASARANA DAN SARANA PERSAMPAHAN**

Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan operasional persampahan, terutama dengan pemeliharaan kebersihan lingkungan jalan protokol sehingga akan dapat terwujud lingkungan perkotaan yang bersih dan nyaman untuk mendukung program Adipura.

Kegiatan ini terdiri dari beberapa sub kegiatan antara lain pengadaan tenaga kebersihan/ tenaga harian lepas/ PTT, pengadaan ekstra fooding bagi petugas kebersihan, pengadaan tanah urug TPA, pemeliharaan sarana operasional persampahan, pengadaan jalan lokasi TPA, pengadaan URC persampahan, pengadaan tanaman hias, dll

### **C. Pengembangan Teknologi Pengolahan Persampahan**

Selain menyediakan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan, pemerintah juga dituntut untuk berperan dalam mengembangkan teknologi pengolahan sampah dimana sampah dapat terolah dan bermanfaat secara ekonomis. Untuk itu kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka pengembangan teknologi pengolahan sampah khususnya sampah organik menjadi menjadi produk yang bernilai ekonomi, yaitu kompos/ pupuk tanaman serta untuk mengurangi beban sampah di Tempat pembuangan Akhir (TPA) dengan penyediaan komposter dan Mesin Pencacah Sampah, bangunan TPS 3 R, serta pengadaan dump truk yang bersumber dana dari DAK Bid. LH tahun 2018 untuk meningkatkan mobilitas pengangkutan sampah ke TPA

### **D. Sosialisasi Pengelolaan Persampahan**

Untuk meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap pengelolaan sampah perlu dilakukan sosialisasi kepada warga masyarakat, beberapa sub kegiatan yang dilaksanakan untuk meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap pengelolaan sampah antara lain dengan penyelenggaraan Hari Peduli Sampah Nasional, penyelenggaraan Hari Lingkungan Hidup, serta penyuluhan kepada warga masyarakat.

### **E. Peningkatan peran serta masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan**

Sesuai revisi perubahan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Adipura yang diubah menjadi Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Adipura. Inti perubahan mekanisme peraturan tersebut adalah bahwa bank sampah menjadi point penilaian yang bersifat wajib dalam penilaian adipura dengan bobot nilai 7. Sehingga dengan dibangunkannya bank sampah diharapkan kedepannya masyarakat dapat melakukan konsep 5 M yaitu mengurangi, memilah, memanfaatkan, mendaur ulang dan menabung sampah.

## **• PROGRAM PENGELOLAAN RUANG TERBUKA HIJAU**

Program pengelolaan Ruang terbuka hijau terdiri dari 5 (lima) kegiatan pendukung yaitu :

### **A. Penataan RTH**

Kegiatan Penataan Ruang Terbuka Hijau merupakan kegiatan yang bertujuan meningkatkan kuantitas, fungsi dan kualitas ruang terbuka hijau yaitu dengan penataan lingkungan, pembuatan taman dan kegiatan pendukungnya. Dengan adanya kegiatan ini dapat menambah keindahan, kenyamanan, keasrian lingkungan sebagai ruang public sekaligus berfungsi ekologis

Kegiatan ini untuk mendukung keindahan perkotaan dengan pembuatan/ penataan lingkungan. (pemeliharaan taman dan satwa, taman eks BPN, Taman Simpang asrikanto, Taman Simpang Kragilan, Taman Juwangi II, penyempurnaa taman kec. Banyudono, penyempurnaan taman eks. Puskesmas Karanggede, Penyempurnaan taman eks pasar hewan karanggede, penyempurnaan taman eks KPU dan Statistik, Pemb. Taman Alun Alun Utara, Penataan Umbul Leses, monumen susu tupah, monumen tumpeng merapi, dll .

### **B. Pemeliharaan RTH**

Kegiatan Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau merupakan kegiatan yang berupa pemeliharaan taman untuk wilayah perkotaan mempunyai beberapa sub kegiatan yaitu pengadaan tenaga pertamanan dan pengadaan ekstra fooding bagi tenaga pertamanan. Dengan adanya kegiatan ini diharapkan taman yang ada di wilayah perkotaan terpelihara dengan baik sehingga dapat menambah keindahan wilayah perkotaan.

### **C. Pengembangan Taman Rekreasi**

Kegiatan ini untuk mendukung perkembangan pembangunan Kebun Raya Indrokilo Boyolali yang direncanakan dilaunching pada pertengahan tahun 2019, antara lain dengan sub kegiatan : pengadaan peralatan dan perlengkapan rumah tangga kebun raya, pemb. Rumah kaca display anggrek, penataan area out bound, pemb. Taman energi baru terbarukan, penyempurnaan gerbang kebun raya, pemb. Monumen sosrobirowo, pemb. Jembatan penghubung, pemb. Fitur lukisan dan kolam, pengadaan tenaga kontrak kebun raya, kegiatan rutin kebun raya dll.

### **D. Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan RTH**

Kegiatan pengendalian dan pengawasan pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau merupakan kegiatan yang berisi upaya dan koordinasi dalam pengendalian dan pengawasan pemanfaatan RT sehingga diharapkan RTH yang ada dapat ditingkatkan dan dimanfaatkan secara optimal serta pengendalian terhadap perubahan fungsi RTH dapat dilakukan dengan baik untuk menjaga kualitas dan kuantitas RTH pemeliharaan taman untuk wilayah perkotaan mempunyai beberapa sub kegiatan yaitu pengadaan tenaga pertamanan dan pengadaan ekstra fooding bagi tenaga pertamanan. Dengan adanya kegiatan ini diharapkan taman yang ada di wilayah perkotaan terpelihara dengan baik sehingga dapat menambah keindahan wilayah perkotaan.

#### **E. Koordinasi Program Menuju Indonesia Hijau**

Kegiatan dilaksanakan guna tindak lanjut Program MIH yang diselenggarakan oleh KLH dimana Program MIH bertujuan untuk mendorong pemerintah daerah melaksanakan penambahanutupan vegetasi dalam upaya menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup, mendorong pemanfaatan ruang secara bijaksana, dan meningkatkan resapan gas rumah kaca.

Beberapa sub kegiatan yang dilaksanakan antara lain berupa pengadaan bibit tanaman keras, pendataanutupan vegetasi, dan pembinaan kampung iklim

#### **• PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN PERUSAKAN LINGKUNGAN.**

Program ini terdiri dari 7 (tujuh) kegiatan pendukung yaitu :

##### **A. Penilaian Kota Sehat/Adipura**

Program Adipura bertujuan untuk mendorong pemerintah daerah dan masyarakat mewujudkan kota “bersih dan teduh” (*clean and green city*) dengan menerapkan prinsip-prinsip *Good Governance* (transparansi, partisipasi dan akuntabilitas).

Program Adipura merupakan program yang dinamis, sehingga perbaikan terus menerus (*continuous improvement*) merupakan salah satu prinsip dasar pelaksanaan program ini. Komponen penilaian pada program Adipura pada prinsipnya terdiri dari pengelolaan kebersihan (termasuk sampah), pengendalian pencemaran air, dan pengelolaan ruang terbuka hijau.

Peran masyarakat yang menjadi fokus pelaksanaan Program Adipura ini dalam mewujudkan kota yang lebih bersih dan teduh (*clean and green city*). Bagi kabupaten/ kota yang berhasil mencapai kondisi bersih dan teduh dengan kriteria tertentu akan memperoleh Thropy Adipura yang diserahkan Bapak wakil Presiden Republik Indonesia di Siak Riau tanggal

Dalam acara tersebut diumumkan pula kota terkotor, dengan maksud mendorong motivasi dan menjadi pemersatu komponen kota untuk menuju kota bersih dan teduh.

##### **B. Pemantauan Kualitas Lingkungan**

Kegiatan ini bertujuan untuk melanjutkan dan melengkapi pengadaan alat pemantau air limbah on line yang telah dirintis sebelumnya, sehingga setiap saat dapat diketahui kondisi air limbah yang dibuang di perairan apakah sudah sesuai baku mutu atau masih di atas baku mutu yang dipersyaratkan, sehingga akan lebih mudah untuk penanganannya, selain itu terdapat kegiatan pemetaan sumber limbah B3 yang bertujuan untuk mengetahui potensi limbah B3 yang ada di Kabupaten Boyolali sebagai bahan kebijakan dalam penanganan limbah B3 yang memerlukan pengelolaan secara khusus.

##### **C. Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup**

Kegiatan ini merupakan salah satu jenis Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang lingkungan hidup yang telah dilaksanakan di Kabupaten Boyolali meskipun sekarang Urusan Lingkungan Hidup bukan lagi merupakan Pelayanan Dasar.

Sebagai bentuk pelayanan kepada masyarakat, kegiatan ini menindaklanjuti dan menangani adanya aduan tentang dugaan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan serta pengawasan terhadap ketaatan usaha dan/ atau kegiatan terhadap dokumen lingkungan yang dimiliki.

##### **D. Kegiatan Pengelolaan B3 Dan LB3**

Kegiatan Pengelolaan B3 dan Limbah B3 berupa pembinaan terhadap pengelolaan B3 dan Limbah B3 kepada usaha dan/ kegiatan serta masyarakat, terutama dalam hal penyimpanan sementara B3 dan Limbah B3 sebelum dikelola oleh pihak yang berijin, karena tidak sembarang orang/usaha/kegiatan dapat mengelola limbah ini.

Demikian juga pemanfaatan limbah B3 berbeda perlakuannya dengan jenis limbah yang lain. Pemerintah Kabupaten hanya mengeluarkan ijin penyimpanan limbah B3 dengan persyaratan teknis sesuai ketentuan yang berlaku. Untuk pengiriman dan pengelolaan lebih lanjut ada pihak lain yang berwenang.

##### **E. Pengkajian Dampak Lingkungan**

Merupakan kegiatan penyusunan beberapa kajian lingkungan hidup, serta sosialisasi tentang KLHS kepada pihak terkait. Dengan adanya hasil kajian dapat digunakan sebagai pedoman dalam pengambilan kebijakan di bidang lingkungan hidup sehingga dapat sesuai kebutuhan dan tepat sasaran.

## **F. Koordinasi penyusunan AMDAL**

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan Hidup, disebutkan bahwa usaha dan/atau kegiatan adalah segala bentuk aktivitas yang dapat menimbulkan perubahan terhadap rona lingkungan hidup serta menyebabkan dampak terhadap lingkungan hidup.

Oleh karena itu, setiap usaha dan/atau kegiatan yang memiliki dampak terhadap lingkungan hidup wajib memiliki Dokumen Lingkungan (AMDAL, UKL/UPL, SPPL). Dimana dokumen lingkungan merupakan komitmen usaha dan/ kegiatan untuk mengelola lingkungan usahanya dengan baik sesuai ketentuan yang berlaku. Dokumen lingkungan wajib ada sebelum usaha dan atau kegiatan beroperasi, namun seringkali masih ada dokumen lingkungan hanya dianggap sebagai pelengkap perijinan saja dan dalam pelaksanaan di lapangan sering diabaikan.

Pemrakarsa usaha dan/ kegiatan seringkali mengalami kesulitan dalam penyusunan dokumen lingkungan. Melalui kegiatan ini Dinas Lingkungan Hidup membantu pemrakarsa dalam menyusun dokumen lingkungan.

## **G. Peningkatan Peran serta masyarakat dalam Pengendalian Lingkungan Hidup**

Kegiatan ini merupakan kegiatan dalam rangka mewujudkan sekolah yang berwawasan lingkungan yaitu ADIWIYATA.

Arti adiwiyata adalah tempat yang baik dan ideal dimana dapat diperoleh segala ilmu pengetahuan dan berbagai norma serta etika yang dapat menjadi dasar manusia menuju terciptanya kesejahteraan hidup dan menuju cita-cita pembangunan yang berkelanjutan. Adapun tujuan dari program adiwiyata adalah mewujudkan warga sekolah yang bertanggungjawab dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup melalui tata kelola sekolah yang baik untuk mendukung pembangunan berkelanjutan.

## **• PROGRAM PERLINDUNGAN DAN KONSERVASI SDA & LH**

Program Perlindungan dan konservasi SDA dan LH terdiri dari 4 (empat) kegiatan yaitu :

### **A. Pengembangan Ekowisata dan Jasa Lingkungan**

Kegiatan ini merupakan pendukung perkembangan Kebun raya Indrokilo Boyolali, yaitu pengadaan alat transportasi di lingkungan kebun raya yang ramah lingkungan. Dengan adanya pengadaan ini diharapkan dapat melengkapi sarana di kebun raya dan dapat menambah kelancaran transportasi internal di area kebun raya.

### **B. Kegiatan Pengendalian Dampak Perubahan Iklim**

Isu utama yang berkembang saat ini adalah adanya Pemanasan Global (Global Warming) sebagai akibat sangat majunya perkembangan pembangunan di seluruh wilayah yang tidak diimbangi ( peningkatan Gas Rumah Kaca ) dengan peningkatan luasan wilayah hijau. Alih fungsi hutan menjadi kawasan industri ikut mempercepat dampak tersebut. Sebagai contoh adalah kedatangan musim hujan/ kemarau yang sulit untuk diprediksi. Kegiatan Pengendalian Dampak Perubahan Iklim dilaksanakan guna mewadahi terwujudnya Taman Keanekaragaman Hayati Daerah. Dalam kegiatan ini dilaksanakan penyusunan inventarisasi emisi Gas Rumah Kaca dan BAU, serta rencana aksi untuk penurunan emisi GRK tersebut

### **I. Kegiatan Peningkatan Konservasi Daerah Tangkapan Air Dan Sumber-Sumber Air**

Pembangunan yang sedang giat dilaksanakan seringkali berdampak negatif terhadap keberadaan sumber/ mata air.

Pembangunan gedung, pengaspalan, cor beton dll . menjadikan air hujan lebih cepat dan lebih banyak yang mengalir ke sungai dari pada yang meresap ke dalam tanah, sehingga debit air tanah/ mata air semakin kecil. Untuk mengatasi hal tersebut melalui kegiatan ini, dibangun sumur resapan di daerah tangkapan air hujan yang diharapkan dapat meningkatkan resapan air hujan ke dalam tanah dan mengurangi laju limpasan permukaan, dapat memperpanjang siklus hidrologis serta menekan terjadinya bencana banjir.

### **J. Peningkatan peranserta masyarakat dalam Konservasi SDA**

Pembangunan gedung, pengaspalan, cor beton dll . menjadikan air hujan lebih cepat dan lebih banyak yang mengalir ke sungai dari pada yang meresap ke dalam tanah, sehingga debit air tanah/ mata air semakin kecil.

Seperti halnya sumur resapan, fungsi adanya lubang resapan biopori agak mirip dengan sumur resapan, namun ada beberapa perbedaan mendasar yaitu, lubang resapan biopori berukuran lebih kecil dan dapat dimanfaatkan pula sebagai pembuatan pupuk kompos ( Organic tanaman ).

- **PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS DAN AKSES INFORMASI SDA DAN LH**

Program ini terdiri dari 1 (satu) kegiatan yaitu :

- A. Kegiatan Pengembangan Data Dan Informasi Lingkungan**

Kegiatan Pengembangan Data dan Informasi Lingkungan terdiri dari beberapa sub kegiatan yaitu : Penyusunan Buku Indeks Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah sebagai pengganti dari Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD) , Penyusunan kajian penataan dan pengelolaan TPA, kajian pengelolaan persampahan, kajian inventarisasi potensi SDA, penyusunan data IKLH di Kabupaten Boyolali.

- **PROGRAM PENINGKATAN PENGENDALIAN POLUSI**

Program Peningkatan pengendalian Polusi didukung oleh 4 (empat) kegiatan yaitu :

- A. Kegiatan Pengujian Emisi/Polusi Udara Akibat Aktivitas Industri**

Sebagai salah satu tolok ukur keberhasilan pembangunan bidang lingkungan hidup ada kualitas udara yang sesuai dengan baku mutu lingkungan yang telah ditetapkan. Melalui kegiatan ini dapat diperoleh data kualitas udara pada titik pantau/ lokasi yang telah ditentukan.

- B. Kegiatan Pengujian Kadar Polusi Limbah Padat dan Limbah Cair**

Sebagai salah satu tolok ukur keberhasilan pembangunan bidang lingkungan hidup ada kualitas air dan udara yang sesuai dengan baku mutu lingkungan yang telah ditetapkan. Melalui kegiatan ini dapat diperoleh data kualitas air (sungai) dan Waduk pada titik pantau/ lokasi yang telah ditentukan sehingga bisa diketahui secara dini potensi terjadinya pencemaran air di badna air (sungai, waduk).

- C. Kegiatan Pembangunan Tempat Pembuangan Benda Padat/ Cair Yang Menimbulkan Polusi**

Kegiatan ini bertujuan untuk memanfaatkan limbah (ternak) menjadi gas bio yang bernilai ekonomis dan dapat dimanfaatkan masyarakat sekitar, serta dapat menghasilkan pupuk organik. Dengan adanya IPAL Biogas ini diharapkan pencemaran akibat limbah ternak dapat diminimalkan serta menjadikan lingkungan yang lebih baik.

- D. Kegiatan Penyuluhan dan Pengendalian Polusi dan Pencemaran**

Kegiatan Penyuluhan dan Pengendalian Polusi dan Pencemaran berupa pembinaan dan monitoring terhadap usaha dan/ kegiatan sebagai bagian untuk mendukung pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal Bidang LH. Pelaksanaan monitoring dan pembinaan dilakukan oleh Tim yang dibentuk Kepala Badan Lingkungan Hidup

- **PROGRAM : PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN**

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran merupakan program yang ada pada setiap SKPD yang merupakan kegiatan rutin SKPD untuk mendukung Pelaksanaan Program dan kegiatan lain sesuai bidang dan urusannya.

Program ini terdiri dari 13 (tiga belas) kegiatan yaitu :

- A. Penyediaan jasa surat menyurat**

Kegiatan ini berupa pembelian meterai, prangko untuk memenuhi kebutuhan pelaksanaan administrasi dan surat menyurat mendukung pelayanan administrasi perkantoran

- B. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik**

Kegiatan ini berupa penyediaan untuk pembayaran tagihan rekening telepon, air, listrik dan speedy untuk mendukung kelancaran kegiatan secara umum termasuk pajak air Taman Pandan Alas Boyolali, Listrik Kebun Raya Indrokilo

- C. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja**

Kegiatan berupa penyediaan jasa untuk perbaikan peralatan kerja kantor (terutama komputer, laptop, printer dll) untuk mendukung kelancaran pekerjaan kantor dan pelayanan administrasi perkantoran

- D. Penyediaan alat tulis kantor**

Kegiatan ini berupa penyediaan/ pengadaan pembelian alat tulis kantor untuk kebutuhan alat tulis kantor terutama secretariat untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan kegiatan

- E. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan**

Kegiatan ini berupa penyediaan/pembelian barang cetakan (buku SPP, SSP, SPM, Disposisi, karcis retribusi jasa kebersihan, dll) dan penggandaan (fotocopy, jilid) untuk mendukung kelancaran pelayanan administrasi perkantoran

- F. Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor**

Kegiatan ini berupa pembelian komponen instalasi listrik/ elektronik terutama sarana penerangan lingkungan kantor (lampu) untuk mendukung keaamanan lingkungan kantor.

**G. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor**

Kegiatan ini berupa pengadaan/ penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor seperti computer, laptop. Printer, mebelueur dll...untuk memenuhi kebutuhan akan peralatan dan perlengkapan kantor agar lebih memadai yang akan berguna menunjang mobilitas pelaksanaan pekerjaan.

**H. Penyediaan peralatan rumah tangga**

Kegiatan ini berupa pembelian peralatan kebersihan dan bahan pembersih (sapu, sulak, tempat sampah, sabun, pewangi dll) untuk memenuhi kebutuhan peralatan rumah tangga, sehingga dapat terwujud kondisi lingkungan kantor yang bersih dan nyaman.

**I. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan**

Kegiatan ini berupa pembayaran langganan Koran harian Solo Pos, Jawa Pos dan Suara Merdeka untuk memenuhi kebutuhan bahan bacaan (surat kabar) yang dapat memperluas wawasan sumber daya manusia

**J. Penyediaan bahan logistik kantor**

Kegiatan ini berupa penyediaan/ pembelian bahan bakar minyak (BBM) dan Bahan Bakar Gas (LPG) untuk memenuhi kebutuhan logistik kantor dan menunjang mobilitas kegiatan operasional

**K. Penyediaan makanan dan minuman**

Kegiatan ini dilaksanakan untuk memenuhi kebutuhan minuman harian pegawai, jamuan makanan dan minuman rapat, serta tamu untuk kelancaran pelayanan administrasi perkantoran.

**L. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah**

Kegiatan ini untuk memenuhi kebutuhan pelaksanaan perjalanan dinas dalam dan luar daerah baik konsultasi maupun koordinasi yang menunjang mobilitas pelaksanaan tugas

**M. Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran**

Kegiatan ini berupa penyediaan tenaga pemeliharaan kebersihan keamanan dan administrasi perkantoran pada baik berupa PTT, THL maupun jasa pihak ketiga yang dapat mendukung terciptanya kondisi lingkungan kantor yang terjaga kebersihan dan keamanan serta menambah kelancaran pelayanan administrasi perkantoran

• PROGRAM : PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur terdiri dari 2 (dua) kegiatan yaitu :

**A. Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas operasional**

Kegiatan ini dilaksanakan untuk pemeliharaan kendaraan dinas operasional (servis, penggantian suku cadang, pajak kendaraan dll. ) sehingga kendaraan dinas lebih terawat serta layak operasional/ pakai

**B. Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor**

Kegiatan ini dilaksanakan untuk memelihara/ merawat secara rutin dan berkala gedung kantor sehingga Kondisi bangunan kantor lebih terawat sehingga terasa nyaman untuk mendukung lingkungan kerja yang kondusif dan nyaman bagi karyawan/wati.

• PROG. : PENINGKATAN KUALITAS SDM

Kegiatan : **Pendidikan dan Pelatihan PNS**

Kegiatan ini berupa pengiriman PNS sebagai peserta pendidikan dan pelatihan teknis untuk meningkatkan kemampuan teknis dan ketrampilan guna mendukung pelaksanaan tugas kedinasan sesuai tupoksinya

• PROG : PENINGKATAN & PENGEMB. SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA SKPD

**Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD**

Kegiatan ini untuk menyusun perencanaan dan pelaporan pada Dinas Lingkungan Hidup Kab. Boyolali baik Laporan rutin bulanan, dan tri bulanan serta mengumpulkan bahan penyusunan RKPD

• PROGRAM : PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

**Kegiatan Penyusunan Renstra dan renja SKPD**

Kegiatan ini dilaksanakan terutama untuk menyusun Renja SKPD sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan tahunan sehingga program dan kegiatan yang dilaksanakan tidak menyimpang dari perencanaan awal mendukung pencapaian visi dan misi kepala daerah.